

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEOR

2.1 Tinjauan Pusaka

Berikut ini merupakan matriks tentang penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul penelitian	Hasil Penelitian
1.	Akhsin Mustakim, Purwoko dkk(2014), Turunnya Suara Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor turunnya suara PPP dari pemilu 1999 sampai 2014 terjadi karena berbagai faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya perpecahan diantara kader mulai dari kaderisasi, tidak dicalonkan menjadi caleg, sampai perebutan suara untuk mendapatkan kursi legislatif. Untuk faktor eksternal adalah perubahan sistem partai ke multipartai, perubahan pemilu proposional berdasarkan suara terbanyak, dan perubahan perilaku pemilih yang semula berdasarkan kedekatan ideologis ataupun sosiologis, namun bergeser menjadi pemilih pragmatis.
2.	Imam Mulyadi (2002), Penurunan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilu 1999	Dari penelitian tersebut menghasilkan suatu kesimpulan penurunan suara PPP karena kontalasi politik di era reformasi

mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa hal. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut tidak serta merta berdiri sendiri tapi merupakan implikasi bahkan repetisi dan fenomena yang terjadi pada masa-masa sebelumnya sehingga layak dijadikan referensi bagi partai politik.

3. Tehuayo, Johan, Dr. Purwo Santoso, MA (2007), Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penurunan Perolehan Suara PPP Pada Pemilu 2004 di Kota Ambon Provinsi Maluku
- Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa, penurunan perolehan suara PPP pada pemilu 2004 di kota Ambon, di sebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Pertama, faktor eksternal yang lebih dominan berpengaruh adalah kehadiran partai-partai Islam alternatif (PKS, PBB, PBR, PAN, PKB), yang berakibat pada perpecahan dilevel internal organisasi PPP, dan level basis Islam, Sedangkan, konflik Ambon, yang salah satu penyebabnya adalah kecenderungan elit-elit politik lokal dalam meraih kekuasaan dengan menggunakan partai politik berakibat pada munculnya konflik dalam DPC PPP, konflik Ambon juga berdampak pada segregasi penduduk menurut agama, yang meluas sapa pada rana kehidupan masyarakat. Kondisi yang yang parah

akibat konflik ini berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya, disamping itu, berkurangnya jumlah penduduk Islam di kota Ambon. Kedua, faktor internal yang lebih dominan berpengaruh adalah, konflik internal, yang disebabkan oleh kepemimpinan yang oligarky, dan perbedaan kepentingan diantara elit partai, yang berakibat pada kepakuman organisasi.

Secara umum, penelitian di atas tidak ada yang membahas secara spesifik tentang konflik internal DPP PPP yang mempengaruhi menurunnya suara PPP di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dan yang membedakan dengan penelitian di atas juga tempat daerah yang peneliti lakukan.

Sehingga yang memebedakan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada objek penelitiannya, dimana penelitian ini akan fokus pada konflik internal DPP PPP yang mempengaruhi menurunnya suara PPP pada pemilu 2019 di Kota Depok

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Faksionalisasi

Partai politik merupakan aktor penting di dalam sebuah sistem demokrasi. Parpol menjadi alat utama dari representasi penduduk, yang

berkompetensi dalam pemilu, dan dipilih oleh pemilih berdasarkan dan kebijakan yang mereka tawarkan. Sebagai representasi masyarakat yang memiliki beragam identitas dan kepentingan, partai politik tentu bukan organisasi yang bersifat homogen.

Partai merupakan organisasi yang bersifat kolektif dan heterogen karena terbentuk dari koalisi beberapa aktor yang selain memiliki tujuan dan kepentingan Bersama, tetapi juga memiliki kepentingan individu. Oleh sebab itulah, pembelahan partai politik menjadi beberapa faksi rentan untuk terjadi. Partai merupakan organisasi bersifat kolektif dan heterogen karena terbentuk dari koalisi beberapa aktor yang selain punya tujuan dan kepentingan Bersama, tetapi juga memiliki kepentingan individu. Oleh sebab itulah, pembelahan partai politik menjadi beberapa faksi rentan untuk terjadi.

Faksi menjadi istilah yang umum yang digunakan untuk banyak institusi politik. Jika merujuk pada definisi yang disampaikan oleh Beller, Belloni, Rose, dan Zariski, maka dapat ditarik dua elemen penting dari faksi, yakni: (1) subkelompok yang menjadi

Bagian dari kelompok yang lebih besar, dan (2) subkelompok dipersatukan oleh identitas dan tujuan yang sama. Belle, Belloni, dan Rose mendefinisikan faksi sebagai faksi politik, dan bukan secara khusus mengenai faksi intrapartai.

Sedangkan Zariski mengartikan⁵ faksi sebagai kelompok intra partai, dimana anggotanya memiliki identitas dan tujuan yang sama, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.⁶

Tujuan faksi sangat beragam, termasuk: mempertahankan patronase dan kontrol faksi atas partai, mempengaruhi strategi dan kebijakan partai, serta mengusulkan serangkaian nilai baru kepada rakyat. Sementara Ian McAllister mengatakan bahwa faksi sebagai kekuatan-kekuatanyang bersaing untuk mendapatkan pengaruh dari institusi-institusi penting di dalam kepengurusan partai mengenai perumusan kebijakan partai dan penentuan kandidat untuk mengisi jabatan politik di partai maupun pemerintah.

Dalam perkembangannya mengenai faksi, Francoise Boucek melihat faksi sebagai entitas yang statis. Oleh karenanya, boucek membawa istilah faksionalisasi dan mengartikannya sebagai proses yang dinamis dan proses ini dapat bertransformasi berulang kali sesuai dengan respon dari insentif yang diperoleh subkelompok tersebut. Terdapat tiga faksionalisasi menurut Boucek, yakni:

1. Faksionalisasi yang kooperatif, yakni kondisi faksi yang memiliki potensi untuk mempersatukan partai politik. Dalam bentuk ini faksi-faksi bisa saja memiliki pendapat dan pilihan politik yang berbeda, tetapi mereka bekerja untuk membangun dan

⁵ Budiatri, Aisah Putri. *Faksi dan Konflik Internal Partai politik di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm 12

⁶ *Ibid*, hal 13

mempersatukan partai. Hal ini berlangsung di dalam proses politik yang demokratis.

2. Faksionalisasi kompetitif, yakni kondisi yang terbentuk sebagai hasil dari ketidaksepahaman antarkelompok terkait dengan penerimaan insentif. Jenis⁷ pembelahan partai ini cenderung akan berdampak negatif bagi partai karena akan meruncing kompetisi antarfaksi, menimbulkan konflik internal, melemahkan ikatan antarfaksi, dan memicu fragmentasi partai politik
3. Faksionalisasi degeneratif yakni kondisi yang muncul bila faksi di dalam partai berjumlahterlalu banyak dan faksi tersebut ada untuk melaanggengkan hubungan patronase. Faksi yang degeneratif ini terbentuk untuk merebutkan insentif kelompok dan akan berakhir pada hancurnya partai politik atau terpecahnya partai. Disini Boucek memperlihatkan bahwa faksionalisasi dapat berubah bentuk dari faksionalisasi kooperatif menjadi faksionalisasi kompetitif, lalu menjadi faksionalisasi degeneratif.

Sehubungan dengan itu David Hine berpendapat bahwa faksi akan menjadi faktor konflik internal partai manakala ikatan antar faksi partai lebih dipengaruhi oleh kepentingan individu/kelompok dibandingkan oleh adanya kesamaan gagasan.

⁷ Lili Romli, "Koalisi dan Konflik partai Politik Pada Era Reformasi", *Politica* Vol. 8 No. 2, Hal 97

Faksi di dalam partai politik dapat mencerminkan berbagai kombinasi motif yang berbeda, seperti perbedaan ideologi atau isu, perbedaan sosial dan budaya, dan pertarungan kepemimpinan pribadi. Sesuai dengan teori Hine, konflik internal partai melekat dengan kemunculan faksi di dalam partai. Dengan kata lain, konflik tidak akan terbentuk bila tidak didahului oleh keberadaan faksi di dalam partai. Namun, perlu kembali diingat bahwa merujuk pada teori Boucek, maka hanya faksionalisasi yang terkategori kompetitif dan degenerative yang mengarah kepada konflik partai dan pembentuk partai baru pada era reformasi cukup tinggi dan konsisten selalu terjadi di setiap periode pemilu.⁸

2.2.2 Konflik

Konflik merupakan suatu inheren dalam setiap masyarakat atau suatu organisasi. Tidak ada satu masyarakat atau organisasi pun yang bisa lepas dari konflik. Konflik yang terjadi dalam masyarakat tersebut bisa dalam bentuk kekerasan dan non-kekerasan.

Konflik dalam bentuk kekerasan adalah konflik yang saling melukai atau saling menghancurkan satu sama lain di antara pihak – pihak yang terlibat didalamnya sedangkan konflik non-kekerasan adalah konflik karena perbedaan pendapat atau gagasan dalam alam demokrasi, perbedaan perbedaan atau pendapat merupakan bagian dari dinamika demokrasi itu sendiri.

⁸ *Ibid.*, hal. 15

Secara sederhana, makna konflik adalah karena adanya perbedaan – perbedaan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain di antara perbedaan kepentingan itu adalah kepentingan politik, sehingga disebut juga sebagai konflik politik. Ada tiga macam konflik politik. Pertama, konflik karena memperebutkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan. Kedua, konflik politik karena kebijakan-kebijakan politik. Ketiga, konflik politik muncul karena perbedaan pandangan terhadap lembaga-lembaga politik.

Motif seseorang untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan menurut penjelasan Maurice Duverger, bisa didasarkan oleh motif ekonomi dan motif altruistik. Duverger mengemukakan bahwa ada dua doktrin terkait perjuangan untuk kepentingan politik. Pertama, doktrin liberal yang mengatakan bahwa motif perjuangan kepentingan politik ekuivalen dengan doktrin borjuis dari teori Charles Darwin tentang “struggle for life”.

Atas dasar itu di dalam arena politik maka perjuangan itu menjadi “perjuangan untuk posisi utama” dalam jabatan politik. Terkait dengan ini maka persaingan memperebutkan posisi politik tersebut didasarkan pada motif-motif ekonomi dan keinginan -keinginan sendiri.

Ini berbeda dengan doktrin kedua, yaitu pandangan kalangan konservatif bahwa motif perjuangan untuk politik didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan altruistik.

Mereka yang berjuang untuk kekuasaan sesungguhnya didorong untuk mengabdikan diri bagi pelayanan masyarakat, suatu bentuk pengorbanan bagi kepentingan umum apa yang dikemukakan Duverger tersebut senada dengan pandangan Max Weber, meski dengan bahasa yang berbeda. Weber menyatakan bahwa orang yang terlibat di dalam politik, terbagi atas dua tipe, yang pertama, karena faktor panggilan hidup (calling), di mana ia memasuki dunia politik sebagai bentuk pengabdian. Kedua, mereka memasuki dunia politik karena faktor mencari pekerjaan dan penghidupan.

Jika faktor pertama yang dikedepankan maka politik sebagai ranah perjuangan untuk mewujudkan nilai-nilai idealisme, sedangkan faktor kedua dunia politik dipenuhi oleh pragmatisme dan oportunisme.⁹ Sedangkan menurut Simon Fisher, yang dikutip di dalam buku Sosiologi Nusantara, ada beberapa teori penyebab terjadinya konflik, salah satunya adalah teori negosiasi prinsip. Menurut teori ini konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dengan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.

⁹ Lili Romli, “*Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi*”. *Politica*. Vol. 8 No. 2, November 2017, hal. 96-97.

Sasarannya adalah untuk membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu serta ¹⁰melancarkan pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak

1. Jenis dan Tipe Konflik

Jenis konflik yang paling umum ada dua macam. Pertama, yaitu dimensi vertikal atau konflik atas. Konflik vertikal adalah konflik antara elit dan massa. Elit adalah orang yang mempunyai jabatan dan mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan di tingkat atas. Kedua adalah konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi di kalangan massa, contohnya adalah konflik antar-agama dan konflik antarsuku. Selain jenis konflik, kita juga perlu mengetahui tipe konflik yang akan menggambarkan sikap, perilaku dan situasi yang ada. Tipe konflik ada empat macam, yaitu tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka dan konflik di permukaan. Tanpa konflik adalah situasi yang menggambarkan keadaan relatif stabil, hubungan antarkelompok bisa saling memenuhi dan damai. Tipe ini bukan berarti tidak ada konflik dalam masyarakat, tetapi karena masyarakat mampu menciptakan struktur¹¹.

¹⁰ Ade Mulyawan, Skripsi: “*Konflik Internal Partai Golkar Pasca Pemilihan Umum 2014*” (Jakarta: UIN, 2017), Hal 26

¹¹ *Ibid*, 28

Sosial yang bersifat mencegah ke arah konflik kekerasan dan juga sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakatnya menjauhi permusuhan dan kekerasan. Selanjutnya ada konflik laten. Konflik laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. Sedangkan konflik terbuka adalah situasi di mana konflik telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.

Lain lagi dengan tipe konflik di permukaan, ia memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran dan dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi (dialog terbuka).

2. Analisis Dinamika Konflik

Menurut Fisher, tahap dinamika konflik meliputi prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pascakonflik.

- a. Prakonflik adalah periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran di antara dua belah pihak atau lebih sehingga menimbulkan konflik. Terjadi ketegangan hubungan dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.
- b. Konfrontasi memperlihatkan bahwa konflik mulai terbuka. Akan ada konfrontasi atau demonstrasi dari para pendukung jika salah satu pihak merasa ada masalah dengan pihak lain.

- c. Krisis merupakan puncak konflik. Di mana konflik pecah dan cenderung ke arah kekerasan akibat pecahnya konflik, bisa jadi salah satu pihak memenangi perang atau kalah, atau mungkin keduanya mengalami kekalahan. Sehingga situasi ini bergantung kepada penanganan konflik. Jika kedua belah pihak melakukan negoisasi dan menggunakan strategi pemecahan masalah (problem solving), kemungkinan hasilnya situasi akan positif dan mengurangi kerugian bersama yang lebih besar. Pada beberapa kasus strategi contending menerapkan keadaan dimana yang kalah mendapatkan kerugian yang besar.
- d. Pada tahap ini tingkat kekerasan menurun dan munculnya inisiatif resolusi konflik.¹²
- e. Pascakonflik adalah situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan bekurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak.¹³

2.2.3 Strategi Politik

Menurut Nursal (dalam Firmanzah, 2007) dalam political marketing, terdapat tiga strategi kampanye politik yaitu: pemasaran produk politik secara langsung kepada calon pemilih (push political

¹² *Ibid*, 29

¹³ *Ibid*, 30

marketing), pemasaran produk politik melalui media massa (pull political marketing), dan melalui kelompok, tokoh atau organisasi yang berpengaruh (pass political marketing).

Push political: strategi ini lebih berfokus pada isu-isu yang penting bagi para electorate dan bukan hanya menjual kandidat atau partai sebagai komoditas. Pesan komunikasi dari strategi ini bisa disampaikan secara langsung oleh kandidat atau partai namun juga bisa melalui relawan yang datang membagikan brosur, flyer, sticker, dsb.

Relawan ini juga yang bertugas untuk mengumpulkan data yang berupa persepsi electorate, mengukur pengaruh pesan dan mencatat¹⁴ perubahan dalam sikap dan perilaku electorate strategi ini cukup mudah dilakukan untuk pemilihan lokal. Pull political: paling banyak dilakukan oleh partai atau kandidat.

Strategi ini menyampaikan pesan melalui media massa baik elektronik, cetak, luar ruang, mobile, maupun internet. Strategi ini dapat menyampaikan pesan kepada khalayak banyak namun kurang dapat terukur efektivitasnya selain itu strategi ini membutuhkan banyak biaya sehingga hanya memungkinkan dilakukan oleh partai maupun kandidat yang punya banyak dana.

¹⁴ *Ibid*

Sedangkan Pass political: pada strategi ini pesan disampaikan melalui individu, kelompok maupun organisasi yang mempunyai pengaruh cara-cara pendekatan dan lobbying pada strategi ini perlu disesuaikan dengan tipe-tipe individu, kelompok dan organisasinya. Sedangkan menurut Kuntowijoyo ada tiga strategi pergerakan dan perjuangan umat Islam yaitu: strategi struktural, kultural dan mobilitas sosial¹⁵.

¹⁵ Debora Sanur Lindawati “*Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014*”
Politica Vol. 4 No. 2 November 2013